

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkembang menghadapi tantangan seperti kontraksi bisnis, peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan pemerintah, dan peningkatan kemiskinan (Carolina, 2023). Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan strategi dan program ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus pada promosi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi secara keseluruhan (Hanim, 2018).

UMKM adalah salah satu sektor usaha yang berperan signifikan dalam menciptakan kesempatan kerja (Maryati, 2014). Pentingnya peran UMKM sebagai generator lapangan pekerjaan yang menimbulkan efek menguntungkan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM juga mendukung diversifikasi ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara dalam menghadapi tantangan global (Aliyah, 2022).

UMKM mampu menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan beberapa faktor seperti: (1) sebagian UMKM menghasilkan barang konsumsi, khususnya yang tidak tahan lama (2) mayoritas UMKM mikro lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha (3) pada umumnya UMKM mikro melakukan spesialisasi produksi yang sangat ketat, dalam artian hanya memproduksi barang/jasa tertentu (4) terbentuknya UMKM mikro terutama di sektor informal sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal karena krisis yang berkepanjangan (Rahman, 2023).

Hartono (2007) menyatakan bahwa UMKM memiliki ciri dan karakteristik seperti struktur permodalan yang terbatas dan kekurangan modal kerja sehingga sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi, izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi, adanya keterkaitan

kekerabatan yang tinggi, sehingga akumulasi modal tidak tercipta, melainkan diantara sanak keluarga, memiliki rasa kebersamaan yang menyebabkan persaingan menjadi terbatas, dan kebanyakan UMKM mikro merupakan usaha untuk mempertahankan hidup dan bukan usaha yang produktif. UMKM tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengalaman kerja individu, hal ini tidak hanya berdampak pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga membentuk tenaga kerja yang lebih terampil dan siap bersaing di pasar global (Rahman, 2023).

Tenaga kerja terampil berusaha menciptakan lapangan kerja mandiri atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena percaya bahwa dengan membangun bisnis sendiri, maka dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup. UMKM juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional (Kamarni, 2015). Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus meningkat, peningkatan ini belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efisiensi kinerja yang merata. Dalam praktiknya, kendala-kendala yang dihadapi sangat banyak dan rumit sehingga menghambat pertumbuhan UMKM secara signifikan. UMKM diharapkan dapat menangani isu-isu domestik yang masih belum teratasi, seperti permasalahan upah pekerja, ketenagakerjaan, pungutan liar, korupsi, dan masih banyak para pengusaha UMKM terkendala modal usaha (Permatasari, 2019).

Modal menjadi fondasi utama dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah usaha, namun, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kerap dihadapkan pada serangkaian tantangan terkait modal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terbatas ke modal. Sumber pembiayaan yang terbatas membuat banyak UMKM kesulitan untuk memulai, memperluas, atau bahkan bertahan dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Institusi keuangan yang cenderung enggan memberikan pinjaman kepada UMKM karena risiko yang dianggap tinggi dan kurangnya jaminan yang memadai menjadi hambatan signifikan. Tingginya bunga pinjaman dan ketidakpastian terkait persyaratan kredit menjadi tantangan ekstra dan tingkat bunga membuat beban pinjaman menjadi berat, sehingga UMKM seringkali terjebak dalam siklus utang yang sulit diputus. Persyaratan yang kompleks dan tidak terjangkau seringkali

membuat UMKM kecil enggan atau sulit untuk memenuhinya, sehingga potensi pertumbuhan usaha menjadi terhambat (Wafiroh, 2023).

Permasalahan modal menjadi penting untuk dicermati, mengingat bahwa pemecahan yang tepat dapat memacu perkembangan UMKM, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perekonomian nasional. Pengelolaan modal yang efisien memungkinkan UMKM untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan efisien juga memungkinkan UMKM untuk bersaing lebih efektif di pasar, mengoptimalkan keuntungan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing secara keseluruhan. UMKM dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dalam pengelolaan modal yang efisien, peningkatan kinerja efisiensi ini juga memungkinkan UMKM untuk bersaing lebih efektif di pasar, mengoptimalkan keuntungan, dan meningkatkan daya saing secara keseluruhan. Efisiensi yang lebih baik dalam operasional dan manajemen keuangan akan membantu UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memanfaatkan peluang bisnis dengan lebih baik (Quartey, 2017).

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan industri ini adalah kurangnya efisiensi dalam operasional bisnis. Efisiensi kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Kemampuan untuk menghasilkan output maksimal dengan input yang tersedia menjadi indikator utama kinerja yang diinginkan. Saat mengukur efisiensi, lembaga keuangan harus mempertimbangkan bagaimana mencapai tingkat output optimal dengan input yang tersedia, atau bagaimana mencapai tingkat input minimum dengan output tertentu, demi mencapai efisiensi yang belum optimal, maka dapat menganalisis alokasi input dan output (Niswati, 2014).

Efisiensi berperan penting dalam memperkuat daya tahan UMKM terhadap perubahan pasar dan lingkungan ekonomi. Dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketidakefisienan proses bisnis, UMKM dapat menjadi lebih tangguh untuk menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan tren konsumen (Fatimah, 2019). Faktor-faktor internal

seperti total aset, lama usaha, dan tingkat pertumbuhan pendapatan memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi UMKM. Total aset mencerminkan kemampuan UMKM dalam mengelola sumber daya dan modal yang dimiliki, yang pada akhirnya mempengaruhi UMKM untuk meningkatkan efisiensi. Lama usaha mengindikasikan pengalaman dan kematangan bisnis dalam menghadapi dinamika pasar, ketika usaha yang lebih lama cenderung memiliki strategi yang lebih efektif dan efisien. Tingkat pertumbuhan pendapatan juga menjadi indikator penting, menunjukkan sejauh mana UMKM berhasil meningkatkan penjualan dan keuntungan, yang mencerminkan kinerja efisiensi operasional, dengan memperhatikan ketiga faktor ini, UMKM dapat memperkuat daya saing dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu sumber dukungan eksternal yang signifikan adalah lembaga keuangan mikro syariah, khususnya yang berbasis syariah, yang memberikan pembiayaan serta bimbingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Ritonga, 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah memegang peran penting dalam mendukung peningkatan efisiensi. Dalam pendekatan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberpihakan pada ekonomi riil, lembaga keuangan mikro syariah mendorong UMKM untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Peningkatan pembiayaan BMT diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha, selain meningkatkan efisiensi, pembiayaan diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM (Bariroh, 2023). Salah satu aspek yang membuat lembaga keuangan mikro syariah relevan adalah pendekatannya yang berfokus pada pembiayaan yang bertanggung jawab, dengan memberikan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, UMKM didorong untuk mengelola dana dengan lebih bijak dan efisien yang mendorong UMKM untuk melakukan investasi yang produktif dan memperhatikan keberlanjutan bisnis (Quartey, 2017).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dinilai lebih cocok dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi skala kecil, hal ini sejalan dengan misi dan peran LKMS untuk meningkatkan akses keuangan bagi lapisan masyarakat terbawah, meningkatkan pemberdayaan dan produktivitas ekonomi, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan terutama untuk yang berpenghasilan rendah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (IKMS) juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong inklusi keuangan, keadilan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan (Rusydia, 2018).

Dalam konteks ekonomi Islam, konsep pembiayaan mikro menempatkan pentingnya memperluas akses terhadap sumber daya keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta mempromosikan mekanisme pengembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. LKMS berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk mengakses pendanaan tanpa bunga (riba) dan mendukung usaha ekonomi produktif yang sesuai dengan prinsip syariah (Sari, 2023). LKMS memainkan peran yang penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (KNKS, 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua tujuan utama: mencapai efisiensi dan kemandirian finansial dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Lembaga keuangan mikro yang fokus pada kemandirian finansial dianggap sebagai organisasi berorientasi bisnis, sedangkan organisasi yang menekankan upaya pengentasan kemiskinan tergolong organisasi berorientasi sosial. Model yang dikembangkan menegaskan bahwa orientasi komersial (kelembagaan) dan sosial (kesejahteraan) dalam keuangan mikro seringkali dianggap sulit untuk diterapkan secara bersamaan (Morduch, 2000).

Konsep unik keuangan mikro di Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* menunjukkan pendekatan yang seimbang yang sesuai dengan tujuan LKMS tanpa mengorbankan tujuan ini atau tujuan lainnya. BMT merupakan konsep keuangan mikro syariah yang memadukan secara harmonis orientasi usaha melalui kegiatan tamwil dan orientasi sosial melalui kegiatan sosial. Dalam konteks ekonomi syariah, konsep BMT mencerminkan penerapan prinsip ekonomi syariah yang memadukan aspek ekonomi dan sosial secara seimbang (KNKS, 2019).

BMT adalah lembaga keuangan yang mengoperasikan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan pedoman dari Al-Qur'an dan Hadits, terutama dalam hal bermuamalah secara Islam (Ramadhan, 2012). Dalam menghindari praktik riba, BMT mengadopsi prinsip bagi hasil investasi dan pembiayaan perdagangan merupakan dua konsep keuangan yang berbeda tetapi saling terkait dalam konteks aktivitas bisnis, untuk

memastikan bahwa bank Islam beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, bank ini mempekerjakan manajer yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam dan prinsip bermuamalah Islam (Ilyas, 2021).

Dasar hukum yang menjadi pijakan bagi BMT adalah Al-Quran dan Hadis. BMT berasal dari aturan hukum bisnis dan Islam, meskipun tidak secara langsung disebutkan, Al-Quran mengatur pengelolaan harta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berikut adalah Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
"يُضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

Artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menggambarkan betapa besar pahala bagi mereka yang bersedekah atau memberikan bantuan di jalan Allah, termasuk dalam bentuk bantuan ekonomi seperti kepada UMKM. Dalam mengalokasikan dana kepada UMKM dan masyarakat yang kurang mampu, kegiatan BMT memastikan bahwa kekayaan yang ada tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga mengalir kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha, memperbaiki taraf hidup, dan menciptakan lapangan kerja.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki peran penting dalam memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. BMT juga sering kali memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan keterampilan bisnis, serta pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Melalui program asuransi dan mekanisme penanganan risiko, BMT juga memberikan perlindungan terhadap harta dan usaha UMKM, selain itu, BMT dapat menjadi sumber konsultasi dan dukungan bagi UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dalam memberikan akses keuangan dan pendidikan, BMT tidak hanya mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan komunitas lokal dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

secara keseluruhan. Hubungan yang erat antara BMT dan UMKM menciptakan ekosistem yang mendukung bagi pertumbuhan bisnis skala mikro dan menengah, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Bariroh, 2023).

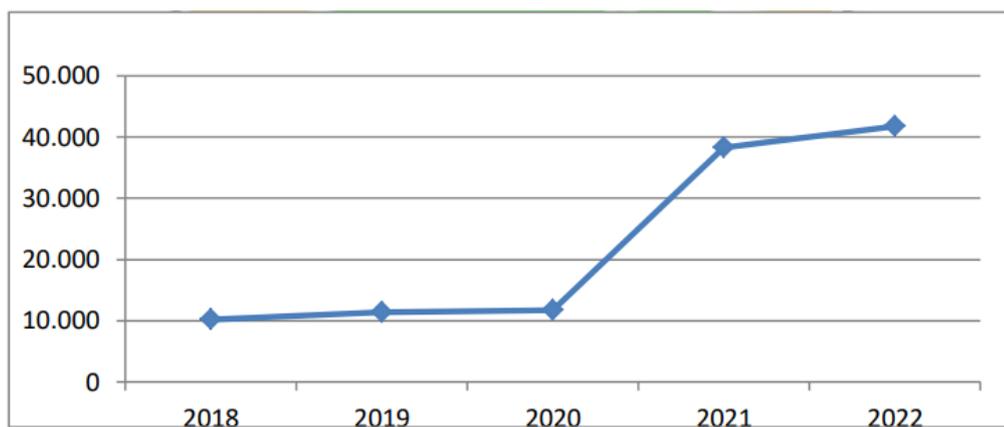
UMKM di Indonesia sangat beragam dan mencakup berbagai sektor, sehingga dukungan dari BMT dapat membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar lokal dan nasional. Berdasarkan data BPS (2009) Indonesia memiliki jumlah usaha sebanyak 4.370 unit (0,01%), sedangkan usaha menengah sebanyak 39.660 unit (0,08%), usaha kecil jumlahnya sebanyak 520.220 unit (1,01%), dan usaha mikro mencapai sebanyak 50.700.000 (98,90%). Data tersebut dapat dilihat bahwa usaha kecil dan mikro mendominasi kalangan usaha yang ada di Indonesia, sehingga sektor usaha kecil dan mikro dapat menjadi kerangka utama dalam membangun perekonomian daerah (BPS Indonesia, 2009).

Jumlah UMKM Sumatera Barat yang berjumlah 296.052 jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Pulau Jawa, akan tetapi Sumatera Barat menempati posisi ke-3 di Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Barat terdapat 19 Kabupaten/Kota yang mempunyai UMKM berpotensi dan meningkatkan perekonomian daerah, salah satunya adalah Kota Padang yang merupakan Ibukota Sumatera Barat. Secara umum berdasarkan jumlah UMKM, posisi Kota Padang pada tahun 2019 menempati urutan ke-4 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Berikut Rekap UMKM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat Per Desember 2019. (BPS Kota Padang, 2024). Kota Padang merupakan kota dengan jumlah UMKM terbanyak ke-4 yaitu sebesar 11.365 di Sumatera Barat dibawah Kabupaten Agam (15.192), Kota Padang Panjang (14.069), dan Kabupaten Solok (12.864), akan tetapi Pemerintah Kota Padang terus mengembangkan UMKM dari tahun ke tahun, terbukti dengan penghargaan yang diterima oleh Kota Padang yaitu jenis penghargaan NATAMUKTI (Kota Penggerak UMKM) yang diberikan Lembaga *ICSB (International Council Small Business)* (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2021).

Pada tahun 2022, Kota Padang dipilih sebagai salah satu daerah untuk Program Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) bersama 8 Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman,

Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok (Adams, 2022). Puncaknya, Kota Padang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas capaiannya pada program Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) tersebut yang melebihi target dari 100 persen. Terkait hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang melibatkan 142 tenaga enumerator dan 12 koordinator enumerator dan melaksanakan pendataan di 104 kelurahan se-Kota Padang. Hasil capaian realisasi pendapatan dan keuangan Kota Padang yang lebih dari 100 persen pada pendataan tersebut mendapatkan penghargaan dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat termasuk 4 orang enumerator dari Pemko Padang (Selvia, 2022).

Berbagai penghargaan yang telah diraih oleh Kota Padang, baik sebagai Kota Penggerak UMKM maupun pendataan UMKM yang melebihi target, tidak terlepas dari upaya maupun strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang merupakan leading sektor dalam rangka mengembangkan UMKM di Kota Padang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 mengenai peran penting Dinas Koperasi terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang adalah melakukan pembinaan UMKM. Terbukti dalam lima tahun terakhir, UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang secara kuantitas terus meningkat, terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Jumlah Unit UMKM di Kota Padang Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, 2022

Berdasarkan gambar 1.1, tahun 2018 jumlah UMKM di Kota Padang yang dijadikan binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang berjumlah 10.211, pada tahun 2019 berjumlah 11.365, pada tahun 2020 berjumlah 11.723, tahun 2021 berjumlah 38.299 dan terakhir pada tahun 2022 berjumlah 41.787. Kebijakan tentang pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* mempunyai posisi penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Melihat kedudukannya yang cukup strategis ini, BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi nasional. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Kehadiran BMT dinilai mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pedagang kecil mikro yang tidak dapat mengakses perbankan. Lembaga ini diharapkan berperan dalam menggairahkan usaha-usaha kecil produktif dan melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir (Rozalinda, 2013).

Kenyataan yang terjadi di pasar-pasar tradisional di Kota Padang, kebanyakan pedagangnya meminjam modal dari rentenir. Hal ini terjadi karena mereka kesulitan memperoleh pinjaman uang dari lembaga keuangan, terutama perbankan. Pelaku usaha terpaksa meminjam uang dari rentenir, karena rentenir dianggap mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan segera, lebih mudah persyaratannya meskipun bunganya tinggi. Praktek rentenir dilakukan dalam bentuk julo-julo tembak, banyaknya praktek rentenir di tengah masyarakat di Kota Padang

mengakibatkan usaha para pedagang kecil di kota ini tidak berkembang. Sebagian besar keuntungan usahanya habis untuk membayar bunga pinjaman yang mencapai 20% (Rozalinda, 2013).

Banyak pedagang kecil di pasar-pasar tradisional di Kota Padang terpaksa meminjam modal dari rentenir karena sulitnya akses ke lembaga keuangan formal. Namun, UMKM memiliki potensi besar untuk mencapai efisiensi jika mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi dapat dicapai dengan mengelola modal kerja secara bijaksana, memaksimalkan penggunaan teknologi, dan meningkatkan keterampilan manajemen, dengan langkah-langkah ini, UMKM dapat menekan biaya operasional, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Akses yang lebih baik ke lembaga keuangan formal, seperti perbankan atau lembaga keuangan mikro syariah, juga sangat penting dalam mencapai efisiensi. Pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang lebih ringan memungkinkan UMKM memanfaatkan modal secara optimal, mempercepat perputaran usaha, dan meningkatkan laba. Keuntungan yang dihasilkan dari efisiensi ini dapat digunakan untuk ekspansi usaha dan pengembangan produk, bukan hanya untuk membayar bunga pinjaman yang tinggi, dengan efisiensi yang optimal, UMKM dapat berkembang lebih baik dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian lokal tanpa tergantung pada rentenir yang membebani. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efisiensi UMKM dengan Pembiayaan Keuangan Mikro Syariah di Kota Padang: Pendekatan Metode *Data Envelopment Analysis*."

B. Rumusan Masalah

Dalam permasalahan yang dihadapi memerlukan pemahaman yang mendalam untuk dipecahkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang relevan dan signifikan yang menjadi fokus utama dalam pencarian solusi yang efektif.

1. Bagaimana efisiensi UMKM dengan pembiayaan BMT di Kota Padang?
2. Apa faktor yang menjadi penentu efisiensi UMKM yang mempunyai pembiayaan dari BMT di Kota Padang?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menyelidiki fenomena yang kompleks dan menarik dengan harapan dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi pemahaman dan pengembangan. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pengetahuan dan praktik di masa depan.

1. Untuk menganalisis efisiensi UMKM dengan pembiayaan BMT di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penentu efisiensi UMKM yang mempunyai pembiayaan dari BMT di Kota Padang.

D. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penelitian ini terdapat lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan konteks, permasalahan yang dihadapi, tujuan penelitian, manfaatnya, cakupan penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Bab ini mengulas teori-teori yang mendukung variabel-variabel dan faktor-faktor yang relevan dalam penelitian, tinjauan literatur terdahulu, dan kerangka kerja penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas rancangan penelitian, operasionalisasi variabel, metode yang dipakai, teknik pengumpulan data dan pemilihan sampel, analisis data, serta uji hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan dipaparkan secara rinci, termasuk temuan-temuan kunci dan interpretasinya. Bab ini juga membahas hasil analisis tersebut dalam konteks teori dan literatur yang relevan, membandingkan dengan studi-studi sebelumnya, dan menjelaskan implikasi dari temuan tersebut.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan menjelaskan kontribusi utama dari studi tersebut. Simpulan akan merangkum temuan-temuan utama dan menjelaskan

bagaimana tujuan penelitian telah tercapai. Bab ini juga memberikan saran untuk penelitian di masa depan, serta rekomendasi praktis berdasarkan hasil penelitian yang dapat diterapkan oleh praktisi atau pemangku kepentingan terkait.

